

Atasi Polusi Plastik dari Aksi Nasional ke Aliansi Global

Rizal Malik

CEO WWF-Indonesia

MENJELANG ketika sedang berlangsung, dan pascadebat calon presiden putaran kedua pada Minggu malam (17/2), banyak pihak telah mengulas komitmen lingkungan kedua kandidat dengan meneliti pernyataan kebijakan yang diterbitkan tiap-tiap tim sukses.

Dari 260 pernyataan kebijakan yang diuraikan calon nomor urut satu, 20% tergocong isu-isu lingkungan. Pihak Jokowi memasukkan poin pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan, keadilan dalam kepemilikan tanah, penegakan hukum untuk kejahatan lingkungan, sektor energi dan pangan, serta pengakuan atas hak masyarakat adat.

Proporsi yang kurang lebih sama, 18% disampaikan calon nomor urut dua. Pihak Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk isu lingkungan dalam pernyataan kebijakannya. Namun, jauh lebih pendek, hanya 148 poin. Mereka menyenut poin pengelolaan hutan berkelanjutan, kesetaraan dalam kepemilikan tanah, penegakan hukum lingkungan, dan energi terbarukan.

Satu yang pasti, tidak ada elaborasi lebih rinci dari kedua kandidat terkait polusi plastik di darat dan di laut, padahal isu ini telah mencapai tingkat krisis. Sebanyak 8 juta ton plastik dari daratan masuk ke perairan dan bermuara ke lautan setiap tahun.

Angka ini diproyeksikan meningkat empat kali lipat pada 2050. Limbah plastik di laut berubah menjadi polutan dan plastik mikro berbahaya bagi keseimbangan alam, industri, mata pencaharian, dan kesehatan manusia yang dampaknya baru kita pahami secara lebih baik sekarang.

Polusi plastik hanya salah satu ancaman terhadap layanan ekosistem laut, tetapi yang satu itu sangat serius. Plastik telah memasuki rantai makanan di laut, dan berdasarkan penelitian terbaru, komponen plastik mikro sudah mulai masuk mulut ke perut.

Pemerintah berkesempatan memanfaatkan momentum penting tahun ini. Keputusan politik untuk berperan nyata dalam perang global melawan polusi plastik perlu dicapai karena menyangkut keselamatan dan kesehatan warga Indonesia

meliputi keuangan, teknologi, serta pengembangan kapasitas.

Beberapa konvensi internasional yang ada telah mengatur hal ihwal polusi plastik. Namun, UN Environment Assessment 2017 mengidentifikasi kesenjangan hukum dan kurangnya kerangka global yang menargetkan polusi plastik di laut secara khusus. Kelompok ahli sampah laut dan plastik mikro yang dibentuk United Nations Environment Assembly (UNEA) mencatat, "respons yang efektif memerlukan kesepakatan baru yang mengikat secara hukum."

Saat ini ada gelombang kuat dukungan internasional bagi kesepakatan baru untuk mengatasi polusi plastik di laut. Tahun lalu saja, pemerintah, masyarakat sipil dan jutaan orang di seluruh dunia telah bersuara menuntut tindakan legislatif yang lebih pasti untuk mengatasi polusi plastik di laut. Sampai saat ini, ada 30 pemerintahan menyatakan dukungan terhadap aksi nyata dunia yang lebih terkoordinasi.

Pertemuan Tingkat Tinggi Lingkungan PBB yang keempat (UNEA4) di Nairobi, Kenya, 11-15 Maret 2019 akan fokus pada upaya perubahan yang memungkinkan bagi sistem global yang lebih berkelanjutan. Upaya ini termasuk penanganan konsumsi, produksi, pembuangan dan daur ulang/pemulihan plastik secara global. Sebuah resolusi diharapkan dicapai untuk penguatan tata kelola polusi plastik di laut secara global.

Pemerintah negara-negara di dunia akan memiliki kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya

untuk meletakkan dasar bagi solusi global guna mengatasi masalah polusi plastik di laut. Namun demikian, kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum ini tidak dapat direalisasikan tanpa kepemimpinan yang kuat dari Indonesia.

RI sebenarnya sudah menyatakan komitmen tujuan pengurangan sampah plastik hingga 70% pada 2025 dan dukungan pendanaan senilai US\$ 1 triliun per tahun untuk mengurangi jumlah produk plastik dan bentuk sampah lain yang mencemari perairan RI.

Pernyataan ini diumumkan Menteri Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan yang juga mengusulkan pengganti plastik yang non-biodegradable dengan bahan yang biodegradable, seperti singkong dan rumput laut. Kebijakan lain, penerapan pajak atas kantong plastik sekali pakai, juga kampanye publik yang konsisten guna mengedukasi perubahan perilaku.

Komitmen RI ini layak dipuji. Indonesia perlu terus menjaga momentum dengan secara terbuka menyatakan komitmen untuk mendorong kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum, guna mengatasi polusi plastik laut sebagai masalah global dan lintas batas di sesi ke empat UNEA di Nairobi, Kenya, Maret 2019.

Krisis plastik ialah masalah bersama, dan hanya upaya global terpadu dan ambisius yang dapat mengatasinya. Kita harapkan Indonesia konsisten mendukung upaya untuk merealisasikan samudra luas yang bebas dari polusi plastik.